

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah berhak menyelenggarakan urusan pemerintahan yang seluas-luasnya sesuai dengan prinsip otonomi dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil pemerintah pusat untuk mengalihkan berbagai macam kewenangan dan kewajiban yang sebelumnya berada di pemerintahan pusat untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Yuandana,2019). Dengan otonomi daerah seperti ini, pemerintah harus menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diidamkan masyarakat. Jika pemerintah dapat mengelola pemerintahan yang dapat memberikan dampak positif bagi rakyatnya, maka dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang baik. Dampak positif tersebut dapat terjadi apabila Pemerintah terus berusaha meningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang dilakukan dengan cara melaporkan informasi publik secara terbuka/transparan (Mukti,2018).

Dengan kemajuan globalisasi, isu kinerja pemerintah kini menjadi fokus perhatian publik, karena pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah belum menunjukkan hasil yang baik yang dapat dirasakan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ideal. Jika pemerintah dapat mengelola pemerintahan yang dapat memberikan dampak positif bagi rakyatnya, maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan tersebut berkinerja baik. Pemerintah harus terus meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Situasi di Indonesia saat ini penuh dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Di sebagian besar daerah, kegiatan KKN justru dilakukan oleh kepala daerah dan anggota legislatif

yang ditunjuk secara eksplisit oleh rakyat sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik, namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi penyelewengan dana. Menurut Istianah dkk (2014), salah satu dampak negatif pelaksanaan otonomi daerah adalah “kejahatan institusional”. Masalah hukum, khususnya yang berkaitan dengan KKN, seperti penyalahgunaan kekuasaan, kasus suap, uang pelicin, perpajakan ilegal, dan penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi adalah hal yang wajar di mata masyarakat Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus korupsi APBD yang terjadi di Kota Cilegon :

1. Kasus korupsi dana proyek pembangunan jalan lingkar selatan cilegon pada tahun 2014 yang digelapkan oleh Pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon senilai Rp 12,7 miliar (news.detik.com)
2. Kasus suap perizinan untuk pembangunan mall Transmart pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Wali Kota Cilegon senilai Rp 1,152 miliar (nasional.tempo.co)

Dalam Al-Quran surat Al-Maidah: 119 telah dijelaskan tentang pentingnya sebuah kejujuran

Allah berfirman, “Inilah saat orang yang jujur memperoleh manfaat dari kejujurannya. Mereka memperoleh surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya. Itulah kemenangan yang agung.” – (Q.S Al-Maidah: 119)

Dari ayat itu menjelaskan bahwa Allah akan membalas setiap amal perbuatan yang sudah mereka lakukan. Berarti manusia yang bekerja dalam sebuah organisasi dengan baik dan jujur maka ia pantas untuk mendapatkan hasil yang baik pula dan mendapatkan keuntungan dan keberkahan atas pekerjaannya. Kita dapat mengambil pelajaran dari ayat diatas bahwa apa yang kita dapatkan adalah sesuai dengan apa

yang kita kerjakan. Allah SWT akan menaikkan derajat bagi mereka yang berusaha tentu dengan cara yang jujur.

Kinerja pemerintah erat kaitannya dengan akuntabilitas dan transparansi. Penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan kinerja pemerintah daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai penyediaan informasi laporan keuangan yang terbuka, jujur, dan akurat kepada masyarakat, dengan memperhatikan hak masyarakat untuk mengetahui segala tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah dan kepatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2002) transparansi merupakan suatu keterbukaan dalam informasi dimana masyarakat berhak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan mengapa kebijakan tersebut dijalankan, dengan mengetahui program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2012) menyatakan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siswandi (2013) mengatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari penyimpangan pengelolaan keuangan pemerintah (Riswanto,2016). Suparno (2012) menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat mempengaruhi kinerja dalam organisasi, Kinerja yang baik penting untuk kelangsungan dan perkembangan organisasi, karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Garini (2011) menyatakan bahwa akuntabilitas akan mempengaruhi kinerja instansi pemerintah. Pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas segala kegiatannya.

Berhasil tidaknya tujuan organisasi terletak pada faktor manusia itu sendiri, sehingga pegawai pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam

melaksanakan tugasnya dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Namun pada kenyataannya masih ada pegawai pemerintah yang tidak menjalankan tugasnya sesuai peraturan. Untuk melakukan perbaikan terhadap kinerja pegawai harus berorientasi pada peningkatan semangat, peningkatan etika profesi dan budaya organisasi guna mencapai perusahaan yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2011), Sawitri (2011) dan Pratama (2012) mengatakan bahwa, budaya organisasi mempunyai pengaruh yang penting terhadap kinerja organisasi, oleh karena itu apabila budaya organisasi baik tentu nya anggota dari organisasi nya pun akan menjadi unggul dan berkualitas. Jika anggotanya bagus dan bermutu, maka kinerja organisasi secara tidak langsung juga akan membaik.

Suatu organisasi juga perlu memberi perhatian lebih dan membiarkan karyawan mempercayai organisasi untuk mendapatkan komitmen karyawan. Jika Anda mendapatkan komitmen dari karyawan tersebut, Anda akan menemukan karyawan yang loyal dan mampu melakukan yang terbaik untuk kepentingan organisasi. Keadaan ini sangat menguntungkan untuk pencapaian tujuan organisasi, karena organisasi akan mendapat dukungan penuh dari anggotanya sehingga dapat sepenuhnya fokus pada tujuan prioritas. Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen sebagai kondisi individu untuk berdiri dalam organisasi dan tujuannya serta ingin mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Menurut definisi ini, komitmen organisasi mencakup unsur-unsur seperti kesetiaan pada organisasi, partisipasi dalam pekerjaan, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah dan Rommy (2011) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Oleh karena itu, jika komitmen organisasi baik maka kinerja organisasi juga akan baik. Organisasi memiliki komitmen yang kuat untuk mengubah struktur birokrasi agar kinerja pegawai dapat dianggarkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi sangat penting untuk membimbing dan memotivasi pegawai agar bekerja sesuai dengan penerapan standar akuntansi dalam pengelolaan anggaran. Dalam studi DeCotiis dan Summers (1987), mereka menemukan bahwa komitmen organisasi adalah prediktor yang kuat dari kinerja karyawan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini diberi judul : **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan”** penelitian yang dilakukan merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sophia Molinda Kakisina dan Indra Bastian (2018) dengan menambahkan variabel independen transparansi, budaya organisasi dan komitmen organisasi,. Dikarenakan terdapat beberapa ketidak konsistenan hasil penelitian-penelitian dari beberapa variabel sebelumnya, maka diperlukan adanya pengujian ulang mengenai faktor-faktor atau variabel yang mempengaruhi kinerja pada pemerintahan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu obyek penelitian terletak pada instansi Pemerintahan Daerah di Kota Cilegon dan populasi-nya yaitu karyawan perangkat daerah Kota Cilegon dan juga waktu penelitian yang dilakukan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pada pemerintahan daerah yang ada di Kota Cilegon?
2. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pada pemerintahan daerah yang ada di Kota Cilegon?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pada pemerintahan daerah yang ada di Kota Cilegon?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pada pemerintahan daerah yang ada di Kota Cilegon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pada pemerintahan daerah yang ada di Kota Cilegon?
2. Untuk menguji secara empiris apakah transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pada pemerintahan daerah yang ada di Kota Cilegon?

3. Untuk menguji secara empiris apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pada pemerintahan daerah yang ada di Kota Cilegon?
4. Untuk menguji secara empiris apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pada pemerintahan daerah yang ada di Kota Cilegon?

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian ini diharapkan mengandung adanya kebermanfaatan bagi semua pihak di berbagai kalangan yang membaca atau pun secara langsung terkait didalamnya. Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan mengenai literatur akuntansi yakni Di sektor publik, terutama yang terkait dengan akuntabilitas dan transparansi, budaya organisasi dan komitmen organisasi, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan terkait penerapan transparansi pelaporan keuangan. Publik juga dapat menilai kinerja pemerintah daerah dalam hal transparansi pelaporan keuangan.